

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory

Teori keagenan (*agency theory*) dipilih sebagai dasar untuk mengembangkan konsep dalam penelitian ini. Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara satu atau lebih orang (prinsipal) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan layanan dan mendelegasikan kekuasaan pengambilan keputusan kepada agen (Jensen, M. C., & Meckling, 1976). Dalam konsep teori keagenan disebutkan bahwa konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pemilik atau pemegang saham, dan manajemen adalah agen. Jika kedua belah pihak (agen dan prinsipal) adalah orang-orang yang berusaha memaksimalkan utilitas masing-masing, maka ada alasan kuat untuk mempercayai bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Prinsipal dapat membatasi hal ini dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk agen dan melakukan pemantauan yang dirancang untuk membatasi agen yang menyimpang. Hal inilah yang menyebabkan biaya keagenan (*agency cost*).

Menurut Jensen, M. C., & Meckling, (1976) biaya keagenan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi agen. Namun, karena kepentingan manajer sangat bervariasi, seringkali tidak mungkin untuk membuat biaya agensi perusahaan menjadi nol untuk memastikan bahwa manajer membuat

keputusan terbaik dari sudut pandang prinsipal. (Jensen, M. C., & Meckling, 1976) membagi biaya keagenan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *The monitoring expenditures by the principle*

Adalah biaya yang dikeluarkan dan ditanggung oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku agen.

2. *The bonding expenditures by the agent*

Adalah biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal.

3. *The residual loss*

Adalah nilai kerugian yang dialami prinsipal akibat keputusan yang diambil oleh agen yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh prinsipal.

Terdapat hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini yaitu agresivitas pajak. Asimetri informasi perlu dikelola dengan baik. Hal ini disebabkan adanya berbagai kepentingan manajer dalam melaporkan aktivitas atau kinerja perusahaan (Setyawanto, 2019). Membandingkan kepentingan prinsipal dan agen dapat mempengaruhi berbagai aspek kinerja industri, termasuk kebijakan industri yang terkait dengan pajak industri. Sistem perpajakan Indonesia yang menggunakan sistem *self-assessment* memungkinkan industri menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan sistem ini, agen dapat memanipulasi penghasilan kena pajak untuk menjaga pendapatan mereka tetap rendah, sehingga beban pajak industri tetap rendah (Ardyansah, 2014).

Hubungan agen teori dengan variabel independen penelitian yaitu yang pertama *capital intensity*, ketika manajemen (agen) melakukan investasi aset tetap dengan cara menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Beban depresiasi yang dapat digunakan sebagai tindakan untuk mengurangi pembayaran pajak sehingga perusahaan semakin melakukan tindakan agresivitas pajak (Prasetyo & Wulandari, 2021).

Leverage menunjukkan kegiatan perusahaan dalam melakukan pendanaannya. Sistem pendanaan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*. Terdapat kemungkinan pihak *principal* tidak menyetujui penambahan pendanaan untuk kegiatan perusahaan, sehingga pihak *agent* memerlukan sumber pendanaan lain yang berasal dari utang untuk dapat menutupi kekurangan dana tersebut (Prasetyo & Wulandari, 2021).

Ukuran perusahaan merupakan suatu tolak ukur yang digunakan oleh pihak *principal* dalam melakukan kegiatan investasi. Semakin besar aset suatu perusahaan maka menunjukkan perusahaan dapat mengelola aset dengan baik. Semakin tinggi aset dapat meningkatkan laba perusahaan. Laba yang tinggi mampu menarik perhatian investor. Pihak *agent* akan berusaha untuk mendapatkan laba agar pihak *principal* tidak merasa dirugikan setelah melakukan investasi (Prasetyo & Wulandari, 2021).

2.1.2 Pajak

a. Pengertian pajak

Menurut Siaham (dalam Aribowo, H. Wirapraja, 2019) mendefinisikan pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan dan pembangunan.

Menurut Rahardja dan Manullang (dalam Aribowo, H. Wirapraja, 2019) Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal sehingga pihak pemerintah mempunyai kekuatan hukum untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada kas Negara yang bersifat memaksa dan legal berdasarkan Undang-Undang tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung yang mempunyai kekuatan hukum untuk menindak lanjut wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- 2) Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (dalam Aribowo, H. Wirapraja, 2019) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem antara lain:

- 1) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang erutang oleh Wajib Pajak.
- 2) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib Pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.3 Manajemen Pajak

a. Pengertian Manajemen Pajak

Menurut Lumbantoruan (dalam Aribowo, H. Wirapraja, 2019) manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Menurut Pohan (dalam Aribowo, H. Wirapraja, 2019) manajemen perpajakan

adalah usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa manajemen pajak adalah proses mengelola urusan perpajakan suatu perusahaan dengan baik, efisien dan ekonomis dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Tujuan dan Fungsi Manajemen Pajak

Menurut Minnick dan Noga (dalam Aribowo, H. Wirapraja, 2019) tujuan dari manajemen pajak adalah untuk mewujudkan fungsi-fungsi manajemen sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai.

Sementara itu menurut Suandy (dalam Aribowo, H. Wirapraja, 2019), tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

- 1) Perencanaan Pajak (*tax planning*).
- 2) Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*tax Implementation*).
- 3) Pengendalian Pajak (*tax control*).

Adapun fungsi dari manajemen pajak menurut Lumbantoran (dalam Aribowo, H. Wirapraja, 2019) antara lain:

1) Perencanaan Pajak (*tax planning*)

Tahap awal dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

2) Meminimalkan kewajiban pajak

Selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak mengetahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak.

2.1.4 Agresivitas Pajak

a. Pengertian Agresivitas Pajak

Martinez (dalam Firmansyah Amrie, 2021) mendefinisikan agresivitas pajak adalah sejauh mana praktik perencanaan pajak dapat mengurangi kewajiban perpajakan, dan tergantung pada intensitas dan legalitas cara penanganannya.

Hanlon dan Heitzman (dalam Firmansyah Amrie, 2021) menekankan bahwa agresivitas pajak adalah kegiatan pemotongan pajak dan tindakan yang sengaja dilakukan untuk menghindari atau mengurangi pembayaran manfaat pajak secara eksplisit, mencakup berbagai strategi perpajakan, dari penghindaran pajak hingga pajak legal.

Agresivitas pajak adalah perencanaan pajak yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak (Wicaksono, 2017) dan dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan yang masih sesuai dengan peraturan perpajakan (*lawful*). Hal tersebut berbeda dengan tax evasion (penggelapan atau penyelundupan pajak).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan perencanaan pajak untuk menurunkan kewajiban perpajakan yang masih sesuai dengan peraturan perpajakan.

b. Manfaat Agresivitas Pajak

Menurut Chen, S., Chen, X., Cheng, Q. & T. (2010) manfaat dari agresivitas pajak yaitu:

- 1) Besarnya penghematan pajak yang diperoleh, yang selanjutnya akan meningkatkan jumlah kas yang akan diperoleh atau diterima oleh pemegang saham.
- 2) Manajemen memperoleh kompensasi dari pemegang saham sebagai imbalan atas penghematan pajak yang diperoleh dari perilaku agresif pajak.
- 3) Manajemen memiliki kesempatan dalam melakukan rent extraction, tindakan dimana manajemen berperilaku oportunistik dan tidak memaksimalkan kepentingan pemegang saham.

c. Pengukuran Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak dapat diukur dengan berbagai cara, yaitu dengan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*, *Book Tax Difference (BTD)*, *Residual Tax Difference (RTC)*, dan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*

1) *Cash Effective Tax Rate (CETR)*

Tujuan dari model ini adalah mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan. Menurut Dyreng (2010) *Cash effective tax rate* dapat dihitung menggunakan rumus:

$$CETR = \frac{\text{Total Kas Pajak yang Dibayarkan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2) *Book Tax Differences (BTD)*

Model ini merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang hanya berupa perbedaan temporer, dan ditunjukkan oleh akun biaya (manfaat) pajak tangguhan. Menurut Djamaluddin (2008) *Book tax differences (BTD)* dihitung menggunakan rumus:

$$BTD = \frac{\text{Perbedaan laba berdasarkan buku}}{\text{Total Aset}}$$

3) *Effective Tax Rate (ETR)*

ETR bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan. Menurut Lanis, R., dan Richardson (2012) *Effective Tax Rate (ETR)* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

4) *Net Profit Margin (NPM)*

Net profit margin (NPM) dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Kasmir, 2009:200):

$$NPM_{\text{index}} = \frac{\text{NPM perusahaan}}{\text{NPM industri}}$$

2.1.5 *Capital Intensity*

a. *Pengertian Capital Intensity*

Menurut Mustika (2017) *capital intensity* merupakan seberapa besar proporsi aset tetap dari total aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan meningkatnya aset tetap perusahaan maka akan meningkat juga produktivitas perusahaan sehingga laba juga akan dapat meningkat.

Capital intensity ratio atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset

tetap (intensitas modal). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan penjualan (Ardyansah, 2014).

Intensitas modal (*capital intensity*) dapat mencerminkan berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan, oleh karena itu kekuatan modal, dapat digunakan sebagai indikator pasar kompetitif perusahaan (Novitasari, 2017).

b. Tujuan dan Manfaat *Capital Intensity*

Menurut Kasmir (2017) beberapa tujuan yang hendak dicapai perusahaan dari penggunaan rasio aktivitas antara lain:

1. Untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau beberapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode;
2. Untuk menghitung berapa hari rata-rata penagihan piutang (*day of receivable*), dimana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari (berapa hari) piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih;
3. Untuk menghitung berapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang;
4. Untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam suatu periode atau berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja digunakan (*working capital turn over*);
5. Untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam suatu periode;

6. Untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan.

c. Pengukuran *Capital Intensity*

Capital Intensity (intensitas modal) seringkali menjadi indikator yang berkaitan dengan dua hal: di antaranya investasi aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan), berikut penjelasannya:

1) *Capital Intensity* (Intensitas Modal)

Capital Intensity (intensitas modal) merupakan seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki (Novitasari, 2017)

$$Capital Intensity = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

2) *Inventory intensity* (Intensitas Persediaan)

Intensitas persediaan adalah bagian berdasarkan rasio intensitas modal yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan menggunakan investasi pada bentuk persediaan (Ardyansah, 2014).

$$Inventory Intensity = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

2.1.6 Leverage

a. Pengertian *Leverage*

Menurut Minar Savitri, D.A,Rahmawati (2017) *Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Dengan kata lain mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam

dari kreditur perusahaan tersebut. Rasio ini digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.

Menurut Kasmir (dalam Ariyani et al., 2019) Rasio leverage atau solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan ditutupi oleh kewajibannya. Dapat juga diartikan seberapa besar beban utang perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Dalam arti luas, rasio leverage atau rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya jika perusahaan tersebut dibubarkan (likuidasi).

Leverage adalah rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara kewajiban perusahaan dengan modal dan aset perusahaan. Perusahaan yang menggunakan Bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat mengurangi (*deductible expense*) penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang.

b. Tujuan dan Manfaat Rasio *Leverage*

Menurut Kasmir (2017) untuk memilih menggunakan modal atau modal pinjaman haruslah menggunakan beberapa perhitungan. Seperti diketahui bahwa penggunaan modal sendiri atau dari modal pinjaman akan memberikan dampak tertentu bagi perusahaan. Pihak manajemen harus pandai mengatur rasio kedua modal tersebut. Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan.

Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas yakni:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor)
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan terhadap kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktivitas khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menilai atau mengukur beberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Sementara itu, manfaat rasio solvabilitas atau leverage ratio adalah:

1. Untuk kewajiban kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Untuk menganalisa kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menganalisa keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap modal;
4. Untuk menganalisa seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;

5. Untuk menganalisa seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menganalisa atau mengukur beberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk mengenali berapan dan pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri; dan
8. Manfaat lainnya. Intinya adalah dengan analisis rasio solvabilitas, perusahaan akan mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman serta mengetahui kewajibannya. Setelah diketahui, manajer keuangan dapat mengambil keputusan yang dianggap perlu guna menyeimbangkan penggunaan modal.

Ada berbagai jenis rasio leverage yang umum digunakan. Jenis-jenis rasio yang ada dalam leverage yaitu (Sujarweni, 2019):

- a. *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Merupakan Perbandingan utang dan modal dalam pembiayaan suatu perusahaan, menunjukkan kemampuan modal suatu perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{Total Debt to Equity ratio (DER)} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

- b. *Total Debt to Total Asset Ratio* (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang dan jumlah seluruh aktiva diketahui. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{Total debt to Asset ratio (DAR)} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}}$$

c. *Long term debt to Equity ratio*

Bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk utang jangka panjang. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{Long term debt to Equity ratio} = \frac{\text{Total Hutang Jangka Panjang}}{\text{Total Aktiva}}$$

d. *Tangible asset debt coverage*

Besarnya aktiva tetap tangible yang digunakan untuk menjamin utang jangka panjang setiap rupiahnya. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\frac{(\text{Jumlah Aktiva} - \text{Intangible} - \text{Utang lancar})}{\text{Hutang jangka Panjang}}$$

e. *Times interest earned ratio*

Besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga utang jangka panjang. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\frac{\text{EBIT}}{\text{Bunga Hutang jangka Panjang}}$$

2.1.7 Ukuran Perusahaan

a. Pengertian Ukuran Perusahaan

Secara umum ukuran dapat di definisikan sebagai alat untuk mengukur besar kecilnya suatu objek. Menurut Hery, (2017) ukuran perusahaan merupakan aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui besarnya skala besar dan kecilnya total aktiva pada akhir tahun. Maskat, (2018:34) ukuran perusahaan adalah salah satu variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai perusahaan.

Definisi ukuran perusahaan adalah ukuran yang mengategorikan ukuran perusahaan dan menggambarkan berbagai kegiatan dan keuntungan perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan kemampuan dan stabilitas perusahaan dalam menghasilkan laba. Dengan kata lain, semakin besar laba bersih perusahaan, maka semakin besar pula perusahaan tersebut (Suyanto & Supramono, 2012) dalam (Cahyadi et al., 2020).

Ukuran perusahaan adalah skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan dengan berbagai cara, yaitu total aset, total penjualan, jumlah karyawan, dll. Definisi ini hampir mirip dengan yang dijelaskan sebelumnya. Total aset dan total penjualan menjadi alat untuk mengukur ukuran perusahaan. Secara umum ukuran perusahaan (organizational size) dapat diartikan sebagai perbandingan ukuran objek.

b. Pengukuran Ukuran Perusahaan

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Marlisa & Fuadati, (2016:7) bahwa ukuran perusahaan dapat diukur dengan melihat nilai ekuiti, nilai penjualan, atau nilai total aset yang dimiliki oleh perusahaan menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat diukur dengan logaritma natural total asset. Menurut Maskat, (2018:34) pengukuran perusahaan dapat diukur dengan logaritma natural dari total asset perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan menguji tentang agresivitas pajak yang dihubungkan dengan berbagai variabel independen, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mustika (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan	Variabel Independen: a. <i>Corporate Social Responsibility</i> b. Ukuran Perusahaan c. Profitabilitas d. <i>Leverage</i> e. <i>Capital Intensity</i> f. Kepemilikan Keluarga Variabel Dependen: Agresivitas Pajak	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, ukuran perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
2.	Eta Febrina Fitria (2018)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Terhadap	Variabel Independen: a. <i>Capital Intensity</i> b. <i>Inventory Intensity</i> c. Profitabilitas d. <i>Leverage</i>	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan <i>Capital Intensity</i> dan <i>Leverage</i> terbukti berpengaruh terhadap

		Agresivitas Pajak	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak	agresivitas pajak, <i>Inventory Intensity</i> dan Profitabilitas terbukti tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
3.	Donny Indradi (2018)	Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak	Variabel Independen: a. Likuiditas b. <i>Capital Intensity</i> Variabel Dependen: Agresivitas Pajak	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan Likuiditas menunjukkan berpengaruh terhadap agresivitas pajak, <i>Capital Intensity</i> menunjukkan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4.	Ayem & Setyadi, (2019)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013- 2017)	Variabel Independen: a. Profitabilitas b. Ukuran Perusahaan c. Komite Audit d. <i>Capital Intensity</i> Variabel Dependen: Agresivitas Pajak	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit <i>Capital Intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak
5.	Indra Alfirmanda Igo Poetra (2019)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Tingkat Agresivitas	Variabel Independen: a. Likuiditas b. <i>Leverage</i> c. <i>Capital Intensity</i>	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan Likuiditas dan <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh

		Wajib Pajak Badan	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak	secara signifikan terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan, <i>Leverage</i> memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan
6.	(Ningrum et al., 2021)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Perusahaan pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Variabel Independen: a. Ukuran perusahaan b. <i>Leverage</i> Variabel Dependen: Agresivitas Pajak	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.
7.	Lilis Karlina (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak	Variabel Independen: a. Profitabilitas b. Likuiditas c. <i>Leverage</i> d. Intensitas Aset Tetap Variabel Dependen: Agresivitas Pajak	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan profitabilitas, likuiditas, intensitas aset tetap berpengaruh tidak signifikan terhadap agresivitas pajak <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak
8.	Fitria Anita (2015)	Pengaruh <i>Corporate</i>	Variabel Independen:	Hasil penelitian yang diperoleh

<i>Social Responsibility, Leverage, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak</i>	a. <i>Corporate Social Responsibility</i> b. <i>Leverage</i> c. <i>Likuiditas</i> d. <i>Ukuran Perusahaan</i> Variabel Dependen: <i>Agresivitas Pajak</i>	menunjukkan <i>Corporate Social Responsibility, leverage</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>agresivitas pajak</i> . <i>Likuiditas</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>agresivitas pajak</i>
---	---	---

Sumber: Data Olahan, 2022

2.3 Kerangka Penelitian

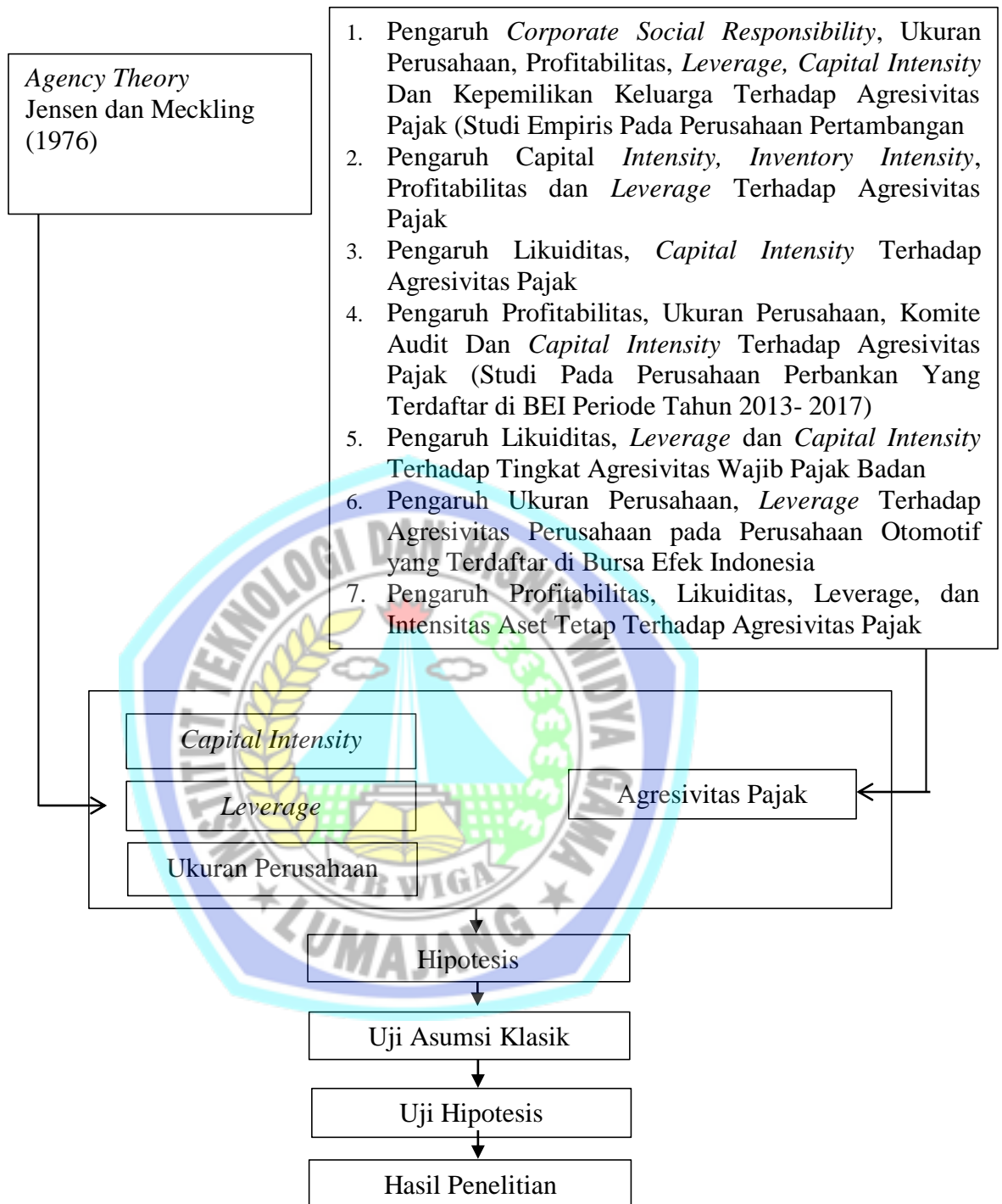
2.3.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2015:89) adalah hubungan komprehensif antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang diuraikan dan berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan, dilanjutkan dengan analisis kritis dan sistematis untuk Menghasilkan hubungan antar variabel yang komprehensif. Darmawan (2013:15) berpendapat bahwa kerangka pemikiran adalah model konseptual bagaimana menghubungkan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai isu penting untuk dinilai. Dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran adalah suatu konsep yang secara teoritis menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti atau hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

Kerangka berpikir dapat berasal dari sumber yang dapat dipercaya seperti buku-buku yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, yang merupakan kunci

pertama untuk menulis kerangka berpikir, selanjutnya dapat bersumber dari penelitian yang sudah dilakukan berupa artikel yang sudah di publish pada periode 10 tahun terakhir dan mempunyai variabel yang berkaitan dengan *capital intensity*, *leverage*, ukuran perusahaan dan agresivitas pajak. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, diajukan suatu hipotesis yang nantinya dapat diuji dengan menggunakan asumsi klasik sebagai syarat regresi linier berganda untuk memperoleh hasil penelitian yang relevan.





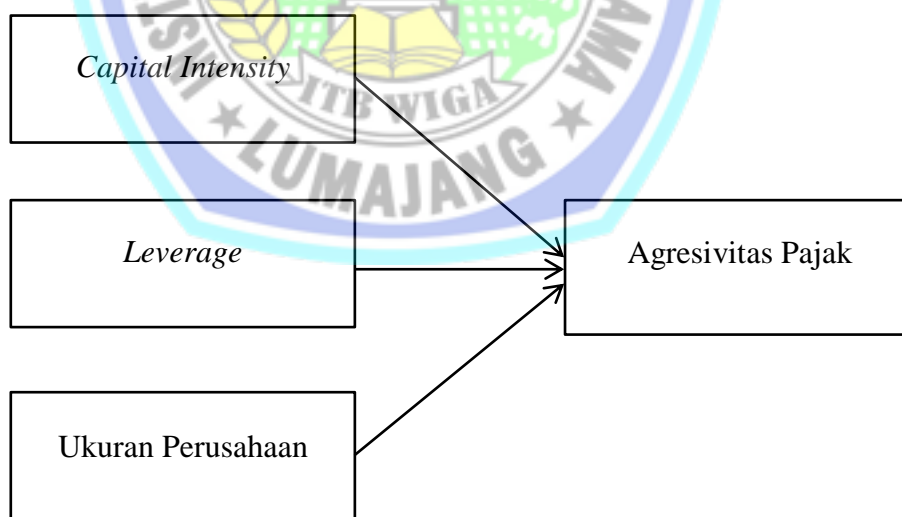
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sumber : Kajian Teoritis dan Empiris

2.3.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh *capital intensity*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

Capital intensity, *leverage*, dan ukuran perusahaan pada penelitian ini bertindak sebagai variabel independen, dimana variabel independen merupakan variabel bebas yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Serta agresivitas pajak pada penelitian ini bertindak sebagai variabel dependen, yaitu variabel terikat yang dapat dipengaruhi oleh variabel independen.

Berikut ini adalah kerangka penelitian yang akan dijadikan sebagai dasar perumusan hipotesis.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual
Sumber: Data Olahan, 2022

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang diajukan peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Peneliti memberikan jawaban sementara berdasarkan teori-teori yang relevan dengan penelitiannya. Dikatakan jawaban sementara karena peneliti belum melakukan penelitian dengan fakta-fakta empiris yang berasal dari proses pengumpulan data-data yang terkait dengan penelitian.

2.4.1 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Capital intensity atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan terkait dengan investasi aset tetap dan persediaan. Aset tetap perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar akibat penyusutan aset tetap. Aset tetap yang diperoleh perusahaan mempunyai umur ekonomis tertentu. Beban penyusutan terjadi setiap tahun. Beban penyusutan ini akan mengurangi laba sebelum pajak, sehingga mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan memiliki aset tetap yang lebih besar memiliki potensi untuk membayar pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan dengan aset tetap yang lebih sedikit.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Setyadi (2019) bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sejalan dengan penelitian (Fitria, 2018) bahwa *capital intensity* terbukti berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Dengan demikian hipotesis sebagai berikut:

H₁: *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Rasio *leverage* menggambarkan keadaan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Tingkat utang yang tinggi mengakibatkan beban bunga yang tinggi dan meningkatkan kemungkinan agresivitas pajak. Perusahaan menggunakan beban bunga untuk mengurangi laba, yang mana nantinya mengurangi penghasilan kena pajak. Dalam penelitian ini menggunakan rumus DAR (*Debt to Assets Ratio*) yaitu untuk mengetahui seberapa berpengaruh aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang dalam pembayaran beban pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan Fitria (2018) bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sejalan dengan penelitian Poetra et al. (2019) bahwa *leverage* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat agresivitas wajib pajak.

Dengan demikian hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

2.4.3 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak

Ukuran suatu perusahaan dapat diartikan sebagai ukuran seberapa besar atau kecilnya suatu perusahaan, dari berbagai perspektif yang ditentukan oleh besar kecilnya aset perusahaan tersebut. Aset yang dimiliki perusahaan berhubungan dengan ukuran perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki maka semakin besar pula perusahaan tersebut. Namun, karena aset mengalami depresiasi setiap tahun dan laba bersih perusahaan dapat menurun, beban pajak akan berkurang sebagai akibat dari depresiasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Setyadi (2019) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sejalan dengan penelitian Ningrum et al. (2021) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Dengan demikian hipotesis sebagai berikut:

H₃: Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

